

# **PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL SEBAGAI MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BURUH PERKEBUNAN**

*Oleh:*

*Dra. Khutobah, M.Pd; Drs. Misno AL., M.Pd; Deditiani Tri Indrianti, S.Pd., M.Sc*

## **ABSTRAK**

Fokus kajian penelitian dilatarbelakangi adanya kondisi bahwa perempuan buruh perkebunan merupakan korban pertama dan utama kemiskinan akibat konstruksi sosial budaya. data yang dikumpulkan bersifat primer dan skunder, untuk kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik kualitatif dan kuantitatif (*Mix metode*). Sampel diambil secara *sensus* dan wawancara mendalam serta pengamatan terlibat. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner dan pedoman wawancara terstruktur. Temuan penelitian adalah adanya kelembagaan serbuk yang dibentuk oleh buruh PDP sumberwadung dan dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat dapat berpotensi mengembangkan program pendidikan keaksaraan fungsional guna memberdayakan perempuan buruh perkebunan.

**Kata kunci:***Kemiskinan, Perempuan Buruh, Keaksaraan Fungsional*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Gerakan pemberantasan buta aksara di Indonesia telah lama dilakukan. Akan tetapi gerakan tersebut masih bersifat parsial dan belum mengakomodasi karakteristik dan tipologi warga belajar. Akibatnya, gerakan pemberantasan buta aksara yang diwujudkan dalam program pendidikan keaksaraan fungsional belum berjalan maksimal. Kehadiran warga belajar lebih berorientasi pada perolehan pemberian sembako oleh penyelenggara. Selain itu, masih banyak daerah sebagai kantong penyandang buta aksara yang belum menjadi sasaran utama program. Sebagaimana di PDP Sumberwadung Kabupaten Jember, dimana masyarakatnya sebagian besar merupakan penyandang buta aksara dan masih belum pernah memperoleh program pemberantasan buta aksara.

Upaya peningkatan kesadaran kritis pada perempuan buruh perkebunan kopi melalui program keaksaraan fungsional belum maksimal apabila mengabaikan karakteristik sosial budaya yang telah melembaga dalam sistem sosial di tingkat lokal. Perhatian ini didasari oleh pertimbangan bahwa, masyarakat perkebunan memiliki tatanan sosial sebagai wujud interkoneksi antara berbagai sendi kehidupan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Amin (2005:172), bahwa masyarakat yang mendiami suatu bentang ruang tertentu dengan kelembagaan dan sistem kepercayaan yang beragam, serta sumber daya alam dan kondisi lingkungan hidup, semuanya mesti dilihat dari satu kesatuan.

Mengingat, kelembagaan masyarakat terbentuk dari tradisi komunitarian berdasarkan kepentingan kolektif serta memiliki fungsi sebagai sistem pengendali sosial. Keberadaannya

pun lebih bersifat adaptif serta lebih mampu menjawab kebutuhan perempuan buruh perkebunan yang lebih spesifik. Sebagaimana diungkapkan Sugiyanto (2002:59), bahwa lembaga sosial dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) disaat komunitas lokal berada pada kondisi krisis, sehingga dapat menjamin stabilitas kelangsungan hidup masyarakat, terbentuk atas kepentingan kolektif, serta menyediakan peran sosial yang sesuai norma dan karakteristik masyarakat di tingkat lokal, sehingga perempuan bersama laki-laki lebih kritis dan mampu merespon kebutuhan lokal yang dapat mempengaruhi kehidupannya tanpa terjadi pengingkaran budaya.

### **Program Keaksaraan Fungsional Sebagai Upaya Penyadaran Kritis**

Buta aksara dan ketidakberdayaan perempuan buruh perkebunan kopi bukan lagi merupakan fenomena sosial, tetapi merupakan masalah kemanusiaan terkait kemiskinan. Oleh karena itu, perlu kebijakan komprehensif dan menyeluruh yang dilakukan secara regional maupun nasional guna menyelesaikan akar penyebab masalah tersebut. Tujuannya, membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran kritis dan mampu merespon situasi yang berpengaruh sebagai sumber-sumber kelangsungan hidup serta mampu melakukan pembacaan kondisi sosial disekitarnya. Pembacaan tersebut merupakan instrumen dalam memperbaiki kehidupan perempuan buruh dan masyarakat pada umumnya.

Bagi Freire (dalam Smith:2001), bahwa upaya penyadaran pada akhirnya bermuara pada pembebasan yang diimplementasikan dengan menggali, mempertahankan dan mengembangkan modal sosial, termasuk kearifan lokal. Nilai sosial budaya, seperti kesetiakawanan sosial, wawasan kebangsaan, dan gotong royong, dioptimalkan sebagai modal dasar dalam menciptakan tanggung jawab sosial. Hal tersebut dapat dilakukan melalui program keaksaraan fungsional, sebagai program pemberdayaan yang mengkombinasikan kegiatan belajar bingarcalistung (berbicara, mendengar, membaca, menulis, dan berhitung), dan keterampilan fungsional. Dimana tujuan program keaksaraan fungsional menyupayakan kemampuan pemahaman dan penyesuaian diri guna mengatasi masalah hidup serta membangun masyarakat untuk melakukan perubahan.

Untuk itu, program keaksaraan fungsional perlu dilihat, dianalisis, dan dipahami dalam kerangka penyadaran kritis. Perubahan yang ingin dicapai adalah tumbuhnya masyarakat gemar belajar. Di mana terdapat perubahan dari situasi kehidupan masyarakat parsial menuju kehidupan yang berencana (*planning society*). Menurut Sudjana (2004: 279) ciri masyarakat belajar adalah: *pertama*, masyarakat gemar mencari informasi guna memenuhi kehidupannya. *Kedua*, masyarakat gemar menemukan informasi. *Ketiga*,

masyarakat gemar menulis dan menyampaikan informasi, dan *keempat* masyarakat gemar melakukan kegiatan belajar secara berkelanjutan atas kesadaran bahwa belajar bagian dari kehidupan, sehingga perlu proses pembelajaran yang responsif dan sesuai konteks sosial

### **Ketimpangan Gender Pada Masyarakat Perkebunan Kopi**

Posisi dan peran perempuan buruh sebagai aktor penggerak produktivitas perkebunan terbatas, termarginal ataupun asimetris dibandingkan laki-laki. Posisi yang diberikan relatif kecil dan tidak adil. Bahkan, secara khusus perempuan buruh lebih sedikit memperoleh sumber daya material, status sosial, kekuasaan dan aktualisasi diri dibanding laki-laki. Secara rinci keberdayaan perempuan buruh perkebunan kopi dapat dikaji dalam beberapa hal, antara lain; *Pertama, akses*. Dimana posisi perempuan buruh guna meningkatkan produktivitas perusahaan besar. Tetapi memiliki keterbatasan ruang gerak dalam mengakses sumber daya yang berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan hidupnya.

*Kedua, Partisipasi*. Keterlibatan perempuan buruh perkebunan dalam sektor publik dan domestik belum maksimal. *Ketiga, Kontrol Sosial*. Dimana perempuan memiliki kontrol sosial lebih kecil dibanding laki-laki untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan dalam masyarakat. *Keempat, kesetaraan*. Perbedaan gender melahirkan ketidakadilan gender yang berbentuk: 1) *Stereotype*, yaitu pandangan negatif terhadap relasi gender yang menyebabkan ketidakadilan. 2) *Subordinasi*, yaitu keyakinan bahwa kedudukan laki-laki dianggap lebih penting dan lebih utama. 3) *Marginalisasi*, yaitu proses peminggiran dan ketidakadilan perempuan akibat perbedaan jenis kelamin. 4) *Kekerasan*, yaitu bentuk kekerasan yang tidak hanya menyangkut fisik tetapi juga menyangkut psikis, sehingga laki-laki atau perempuan mengalami gejala emosional dan ketidaktenangan batin. 5) *Beban ganda*, yaitu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan dalam menjalankan beban kerja antara laki-laki dan perempuan (Anomin: 2005; 34-35).

Ketidakadilan atau ketimpangan gender oleh Fakih (1996: 35) disebabkan karena perbedaan laki-laki dan perempuan tidak hanya dilihat secara biologis (*nature*) tetapi lebih dilihat dari kepribadian yang ditentukan masyarakat (*nurture*), sehingga secara situasional perempuan dianggap sebagai makhluk lemah dan kurang mampu memenuhi kebutuhannya, laki-laki dianggap lebih kuat dan lebih mampu. Untuk itu, perlu adanya upaya penyadaran guna mengurangi ketidakadilan gender dalam masyarakat sesuai karakteristik ditingkat lokal.

## **Potensi Kelembagaan Lokal pada Masyarakat Perkebunan**

Kelembagaan lokal memiliki potensi yang tidak hanya menyangkut sumber ekonomi, tetapi juga perangkat institusi sosial yang melembaga sebagai wujud kecerdasan lokal (*local genius*) dalam memenuhi kebutuhan. Sebagaimana dikatakan Sugiyanto (2002;27), bahwa tatanan masyarakat tumbuh akibat tingkahlaku yang diulang guna memenuhi kebutuhan dan melekat pada pola kehidupan masyarakat. Dimana keberadaan kelembagaan masyarakat di tingkat lokal dapat membangkitkan martabat kaum lemah, menghambat internalisasi ketidakadilan, dan menciptakan berbagai saluran bagi kelompok terpinggir untuk bersuara dan membuat perubahan yang berarti (Anonim: 2006:79). Oleh karena itu kelembagaan masyarakat efektif guna meningkatkan keberdayaan perempuan.

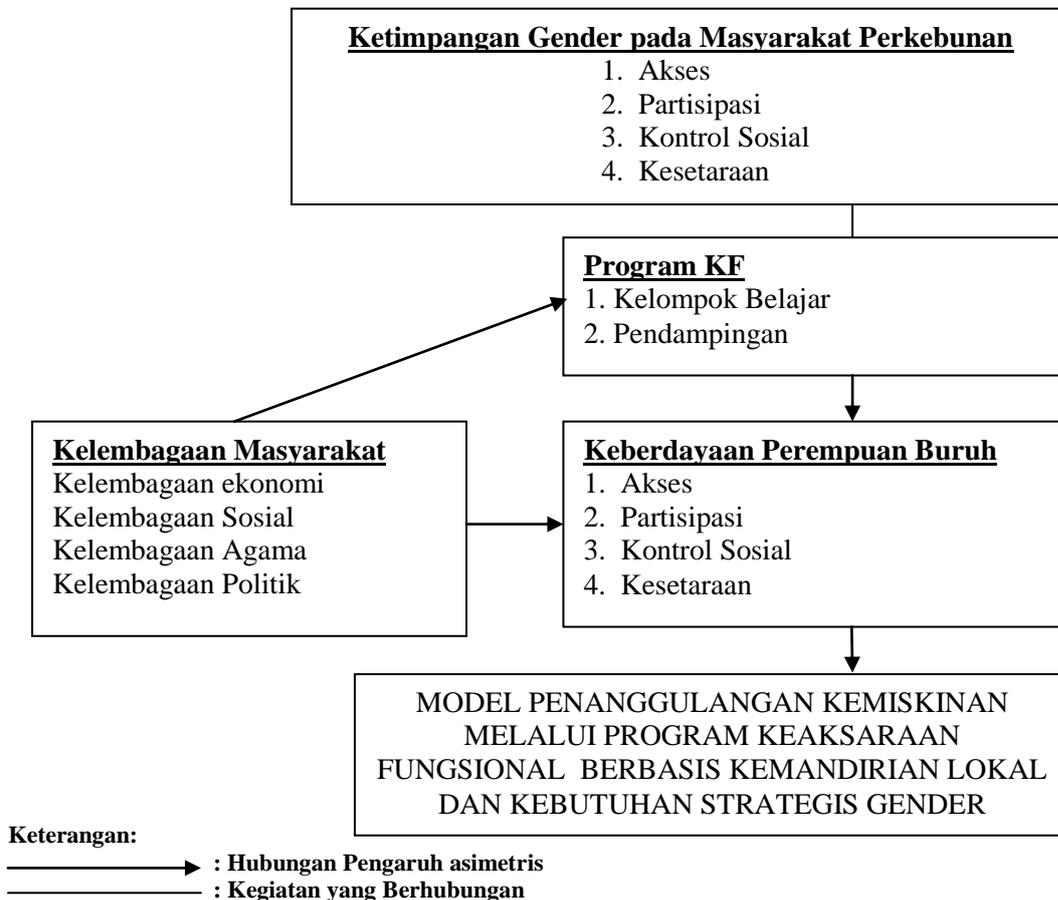
Menurut Sugiyanto (2002;38) kelembagaan masyarakat diartikan sebagai tempat pemenuhan kebutuhan dan memiliki anggota yang berkembang secara dinamis melalui dimensi kehidupan masyarakat. Secara abstrak lembaga sosial merupakan peraturan atau norma untuk mengatur persoalan dan perilaku anggotanya. Koentjaraningrat dalam Soekanto (1990: 217), mengatakan lembaga masyarakat sebagai sistem tata kelakuan dan hubungan berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, Kelembagaan masyarakat pada umumnya terbentuk dari ikatan social guna menciptakan kesepakatan sosial yang mengikat.

Oleh karena itu, kelembagaan masyarakat ditingkat lokal penting untuk dipertimbangkan guna dijadikan sarana melakukan penyadaran kepada perempuan buruh perkebunan. Dimana penyadaran dilakukan sebagai awal untuk memberikan kapasitas untuk kemudian didayagunakan dalam melakukan akses terhadap berbagai sumber kehidupan. Untuk itu, dalam penelitian ini tergambar pentingnya program keaksaraan fungsional berbasis kelembagaan lokal yang bertujuan meningkatkan kesadaran perempuan guna menyelesaikan masalah kemiskinan pada masyarakat perusahaan daerah perkebunan kopi. Dimana kompleksitas interaksi sosial dan alam dalam kehidupan bermasyarakat menghasilkan pola fenomenal dan spesifik lokal, sehingga perempuan menjadi manusia kritis dan menjadi lebih peka dalam menghadapi berbagai tekanan social.

## METODE PENELITIAN

### Rancangan Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai berikut:



**Gambar 1.**  
**Rancangan Penelitian**

### Metode Dasar

Kerangka besar penelitian ini menggunakan *deskriptif eksplanasi* dengan menggabungkan data kualitatif dan data kuantitatif (*mix metode*) dimana data kuantitatif mendukung data kualitatif.

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Sumberwadung Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi didasarkan pada data yang dihimpun BPS dan Bappeda Jember, bahwa PDP Sumberwadung merupakan Perusahaan Daerah Perkebunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan hasil produksi kopi terbesar yaitu 5,99 ton dibandingkan produktivitas tanaman kopi 4,09 ton perhektarnya (Jember dalam angka: 2011). Namun, memiliki masyarakat dengan tingkat buta aksara yang masih cukup besar.

## **Teknik pengambilan Sampel Penelitian**

Sampel penelitian ditentukan secara sensus. Dimana responden diambil secara keseluruhan dengan kategori buruh laki-laki dan perempuan yang berdomisili di PDP sumberwadung Kabupaten Jember.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik:

1. Wawancara, pertanyaan yang diajukan kepada informan guna menggali informasi potensi kelembagaan masyarakat dan keberdayaan laki-laki serta perempuan.
2. Kuesioner, merupakan daftar pertanyaan untuk dijawab responden dan berhubungan dengan tujuan penelitian (pada bab 1).
3. Observasi, dilakukan untuk mengamati kelembagaan lokal yang potensial untuk dimanfaatkan dan dikembangkan pada program keaksaraan fungsional, serta mengobservasi kegiatan perempuan di ranah domestik maupun publik terkait dengan kehidupan masyarakat perkebunan.
4. Pencatatan laporan atau dokumentasi yang berhubungan dengan gambaran kondisi masyarakat perkebunan dan keadaan geososial PDP Sumberwadung.
5. Studi pustaka, data yang diperoleh dari referensi buku yang terkait dengan tujuan penelitian.

## **Pengolahan data**

Secara keseluruhan data yang didapat diolah dengan teknik *snowball*. Teknik yang dilakukan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu cara meneliti kembali data yang terkumpul melalui wawancara. Tahap tersebut dilakukan terhadap jawaban yang telah ada dalam wawancara melalui kuesioner.
- b. *Coding*, yaitu upaya untuk menyederhanakan data dengan memberi simbol pada jawaban responden.
- c. *Peta Matrik*, yaitu diagram yang dibuat untuk melakukan kajian terhadap kerangka kerja analisis gender. Data yang dikumpulkan terkait dengan profil kegiatan, profil akses dan kontrol, analisis faktor dan kecenderungan, serta analisis daur program. Model analisis GAP (*gender analysis pathway*) untuk melakukan analisis gender dan mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh perempuan dalam kegiatan domestik dan publik

## **Teknik Analisis data**

Setelah data primer maupun sekunder terkumpul, maka langkah pertama adalah melakukan analisis data dengan teknik GAP. Langkah yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Menganalisis tujuan program keaksaraan fungsional yang tertulis dalam pedoman umum, petunjuk teknis operasional, dan berbagai dokumen yang menjadi *record* kegiatan program keaksaraan fungsional serta kegiatan perempuan buruh di ranah public dan domestik.
- 2) *Eye Opener* data. Penyajian data masing-masing sektor menurut kategori usia dalam keaksaraan fungsional untuk melihat adanya tingkat buta huruf kaum perempuan buruh di PDP Sumberwadung Kabupaten Jember
- 3) Analisis faktor kesenjangan, untuk menganalisis ketimpangan gender menurut jenis kelamin, sehingga ditemukan faktor yang menjelaskan potensi kelembagaan masyarakat pada kegiatan di sector public dan domestic guna menanggulangi kemiskinan pada perempuan buruh perkebunan kopi.
- 4) Analisis isu kemiskinan yang terjadi pada perempuan buruh perkebunan kopi pada kegiatan perusahaan daerah perkebunan. Kebijakan yang ada data pendidikan, serta faktor kesenjangan pendidikan selanjutnya dirumuskan isu kebijakan pendidikan sebagai bahan untuk memformat konsep mengenai model penanggulangan kemiskinan melalui program keaksaraan fungsional.
- 5) Indikator program keaksaraan fungsional dirumuskan dan sebelumnya diukur dampak positif bagi terwujudnya keseimbangan dan keadilan perempuan buruh.

## **Uji Hopotesa**

### **Hipotesa 1:**

1. Untuk mengidentifikasi potensi kelembagaan masyarakat ditingkat lokal dalam program keaksaraan fungsional guna menanggulangi kemiskinan perempuan buruh, maka digunakan analisa deskriptif eksplanatif menggunakan SPSS seri 16 dimana:

Ho ditolak jika  $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ , terdapat kelembagaan masyarakat yang potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dalam kegiatan program keaksaraan fungsional sebagai upaya menanggulangi kemiskinan

Ho diterima jika  $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ , berarti tidak terdapat terdapat kelembagaan masyarakat yang potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dalam

kegiatan program kegiatan program keaksaraan fungsional sebagai upaya menanggulangi kemiskinan

2. Uji triangulasi, untuk menguji data wawancara guna mengidentifikasi potensi Kelembagaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan strategis gender.

**Hipotesa 2:**

1. Uji Statistik, untuk mengetahui adanya hubungan kelembagaan lokal, struktur kelompok dan program keaksaraan fungsional, maka digunakan uji korelasi parsial (uji F). Dimana kriteria pengujian:

Ho : ditolak jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  : secara bersama-sama variabel dependen mempengaruhi variabel independen secara signifikan

Ha : diterima jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  : secara bersama-sama variabel dependen tidak berpengaruh terhadap variabel independen secara signifikan

Sebelum data dianalisis dengan menggunakan kedua teknik yang telah disebut di atas, maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi penelitian:

1. Uji Normalitas, yaitu untuk mengetahui apakah antara variabel yang diteliti mengikuti distribusi normal atau tidak
2. Uji linieritas, yaitu untuk mengetahui apakah antara variabel pengaruh yang linier dengan variabel terikat
3. Uji homogenitas, yaitu untuk mengetahui derajat perbedaan pada kelompok yang berbeda dalam memberikan data untuk variabel terikat dan diuji dengan menggunakan SPSS seri 15 dan amos 5
4. Uji triangulasi, untuk mengetahui adanya hubungan kelembagaan lokal, struktur kelompok dan program keaksaraan fungsional

## **HASIL YANG DICAPAI**

### **Kondisi Geografis Kabupaten Jember**

Kabupaten Jember berada pada posisi koordinat  $6^{\circ}27'9''$  sampai dengan  $7^{\circ}14'35''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}59'6''$  sampai dengan  $8^{\circ}33'56''$  Lintang Selatan. Selain itu Kabupaten Jember dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang batas wilayah karena memiliki karakter topografi berbukit hingga pegunungan disisi Utara dan Timur. Akan tetapi di daerah selatan dan tengah merupakan dataran ngarai yang subur. Luas wilayah yang dimilikinya sebesar 3.293,34 Km<sup>2</sup> atau 329.333,94 Ha. Dari segi topografi wilayah, bagian selatan merupakan dataran rendah yang relarif subur untuk pengembangan tanaman pangan. Namun demikian, tidak seluruh wilayah pedesaan di Kabupaten Jember memiliki kesuburan dan potensi daerah yang sama. Seperti kondisi wilayah di Kecamatan Silo yang secara administratif terletak di daerah Timur Kabupaten Jember yang potensial untuk mengembangkan tanaman perkebunan.

Sebagai daerah kabupaten yang berada di bawah pemerintahan Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember terletak pada jarak 198 km dari Ibu Kota Propinsi. Sebelah utara Kabupaten Jember berbatasan langsung dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi, dan wilayah selatan di batasi oleh Samudra Indonesia dengan pulau Nusa Barong merupakan satu-satunya pulau yang terdapat di wilayah Kabupaten Jember dan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi tempat wisata. Namun potensi tersebut belum menjadi fokus pembangunan untuk dikembangkan. Mengingat, Jember memiliki agenda Bulan Berkunjung Ke Jember (BBJ) sebagai ajang promosi potensi daerah.

Selain itu, Kabupaten Jember berada pada letak yang strategis untuk mengembangkan potensi wilayah, karena berada dipersimpangan antara Surabaya dan Bali. Letak wilayah tersebut secara langsung berpengaruh dalam perkembangan ekonomi masyarakat yang cukup pesat untuk menjadi barometer pertumbuhan berbagai sektor di kawasan timur Propinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia semestinya fokus utama pembangunan.

### **b. Kondisi Demografi Penduduk**

Pada dasarnya Kabupaten Jember tidak memiliki penduduk asli, dan hampir semua pendatang. Hal ini dimungkinkan karena Kabupaten Jember merupakan daerah yang mengalami perkembangan cukup pesat khususnya dibidang perdagangan, sehingga

memberikan peluang bagi pendatang untuk berlomba-lomba mencari sumber penghidupan. Namun demikian, mayoritas penduduk yang mendiami Kabupaten Jember adalah suku Jawa dan Madura, disamping masih dijumpai suku lain serta warga keturunan asing sehingga melahirkan komposisi penduduk dalam suatu wilayah yang dipengaruhi oleh kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*) dan perpindahan (*migrasi*). Untuk itu komposisi penduduk berdasarkan data registrasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011, jumlah penduduk Kabupten Jember tercatat sebanyak 2.329.929 jiwa, terdiri atas 1.186.163 jiwa perempuan dan 1.143.766 jiwa laki-laki. Adapun laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2000 sampai dengan 2010 sebesar 0,6321.

Disisi lain, Kabupaten Jember merupakan daerah penghasil taman perkebunan. Dimana secara geografis sebagian besar tanaman perkebunan terdapat di Kecamatan Silo yang merupakan penghasil tanaman kopi terbesar di Kabupaten Jember. Menurut data yang dihimpun BPS 2011 tanaman kopi yang dihasilkan sebesar 11.643,43 Kwintal. Penghasil Kopi terbesar terdapat di PDP Sumberwadung. Namun demikian, kehidupan ekonomi masyarakat di wilayah PDP Sumberwadung masih tergolong miskin dibandingkan daerah lain yang berada di wilayah Kabupaten Jember. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya keluarga yang masih tergolong prasejahtera karena alasan ekonomi sebanyak 834 rumah tangga dan alasan bukan ekonomi sebanyak 249 rumah tangga, sedangkan keluarga yang tergolong keluarga sejahtera I sebanyak 1.192 keluarga, keluarga sejahtera II sebanyak 830, keluarga sejahtera III sebanyak 73, dan keluarga sejahtera III + sebanyak 9.

Secara mayoritas masyarakat di PDP Sumberwadung menjadi buruh perkebunan. Dilihat dari tingkat pendidikannya, sumber daya manusia (SDM) PDP Sumberwadung masih tergolong relatif rendah dibandingkan daerah lain yang berada di bawah pemerintahan Kabupaten Jember. Hal ini tampak dari jumlah warga tributa sebanyak 115 jiwa.

### **c. Struktur Sosial dan Ekonomi Masyarakat**

Kabupaten Jember merupakan daerah agraris. Meskipun sektor perkebunan di Kabupeten Jember merupakan penyangga utama perekonomian, tetapi peran tersebut cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun secara perlahan tetapi pasti. Hal ini dapat dilihat dari perubahan peran sektor pertanian di tahun 2010 dan tahun 2011, bahwa peranan sektor perkebunan sebesar 45,09 persen dan 44,71%, selanjutnya dapat dilihat dari hasil observasi banyak perusahaan perkebunan yang telah mengubah tanaman perkebunan menjadi tanaman pertanian.

Selain itu, di struktur sosial masyarakat di PDP Sumberwadung sama dengan daerah perkebunan lainnya. Dimana terdapat lapisan sosial masyarakat, antara lain: buruh, karyawan, dan elit perkebunan yang terdiri dari (mandor, sinder, dan manager). Lapisan sosial tersebut secara langsung berdampak pada kemiskinan yang diakibatkan oleh struktur sosial masyarakat. Mengingat, struktur sosial tersebut dapat membatasi berbagai akses yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.

#### **d. Kualitas Sumberdaya Manusia**

Tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Silo yang tinggal di komunitas PDP Sumberwadung relatif sangat rendah. Bahkan masih banyak ditemukan masyarakat yang belum pernah mendapatkan layanan pendidikan formal. Akibatnya, produksi hasil perkebunan tidak mengalami peningkatan. Bahkan produksi perkebunan selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga disebabkan oleh sulitnya sarana transportasi maupun sarana pendidikan di daerah perkebunan. Mengingat daerah perkebunan merupakan daerah yang terisolasi dan jauh dari berbagai akses pembangunan. Untuk itu, perlu adanya pembangunan di bidang pendidikan di daerah perkebunan dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Dalam hal ini program pendidikan nonformal sangat tepat untuk diterapkan pada masyarakat perkebunan. Salah satu program tersebut adalah pendidikan keaksaraan yang bertujuan memberikan bekal kepada masyarakat dalam mengenal angka dan huruf sebagai bekal mendapatkan pengetahuan dasar.

#### **Kelembagaan Masyarakat yang Potensial pada Masyarakat Perkebunan**

Kelembagaan masyarakat yang ditemukan untuk kemudian dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai wadah menjalankan program pendidikan keaksaraan fungsional adalah organisasi Serbuk. Dimana organisasi tersebut merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat perkebunan melalui bantuan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat perkebunan, dalam hal sosial politik.

Selain itu, hasil identifikasi ditemukan keberadaan Organisasi serbuk memberikan ruang gerak perempuan melakukan berbagai aktifitas terhadap perempuan maupun laki-laki baik diranah domestik dan publik. Perempuan selalu dilibatkan untuk melakukan aktifitas sosial. Kondisi ini merupakan langkah awal untuk membuka wawasan masyarakat di perkebunan yang selama ini menempatkan perempuan pada posisi ter subordinat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Temuan awal penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat dan memiliki potensi untuk meningkatkan keberdayaan perempuan dan laki-laki dalam rangka memenuhi kebutuhan praktis dan strategis gender diranah public dan domestik.

### **Saran**

Namun demikian adanya waktu yang disediakan akan dimanfaatkan secara optimal untuk menyelesaikan penelitian ini dan memperoleh hasil yang maksimal dengan mengolah data yang telah dihimpun oleh tim peneliti dan tenaga lapang. Harapannya penelitian ini menghasilkan luaran yang bermanfaat dalam kajian akademis maupun bagi perencanaan pembangunan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan secara tepat.

Untuk itu, saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini, bahwa para pemangku kepentingan yang tergerak untuk melakukan aksi dalam mengentas kemiskinan, tidak seharusnya mengabaikan karakteristik masyarakat di tingkat lokal. Dimana karakteristik tersebut telah melembaga dan menjadi system social di tingkat masyarakat lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin. 2005. *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Andrijani. 2003. *Analisis Gender dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan. Dalam Perenpuan, Kemiskinan dan Pengambilan Keputusan*. Bandung. Akatiga.
- Cleves, J. 1996. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. 2006. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Handayani dan Sugiarti. 2008. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang. UMM Pers.
- Ife dan Tesoriero. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Peet, R. 1999. *Theories of Development*. London. The Guilford Press.
- Mahardika, T. 2006. *Strategi Membuka Jalan Perubahan*. Yogyakarta. Pondok Edukasi.
- Mikkelsen. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Narayan, D. 2005. *Measuring Empowerment: Cross-Disciplinary Perspective*. Washington, DC. The Word Bank.
- Peet, R. 1999. *Theories of Development*. London. The Guilford Press.
- Ritzer dan Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta. Prenada Utama.
- Sariono. 2002. *Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Manggarai Propinsi NTT*. Yogyakarta. Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Singarambun dan Effendi. 1985. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES.
- Smith, W. 2008. *Conscientizacao Tujuan Pendidikan Paulo Freire*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Soekanto, S. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strtegis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan sosial*. Bandung. PT Refika Aditama.

- Sulistiyani, A . 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta. Gaya Media.
- Sudin. 2006. *Peningkatan Kapasitas Sosial Perempuan melalui Kelompok UEP di Kecamatan Pulau Ternate*. Yogyakarta. Tesis Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada.
- Sugiyanto. 2002. *Lembaga Sosial*. Yogyakarta. Global Pustaka Utama.
- Tjokrowinoto, M. 2004. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Pengarusutamaan Gender*. Jakarta. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.
- Wrihatnolo dan Nugroho. 2007. *Managemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. Elek Media Komputindo.
- Zubaidi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. Ar-ruzz Media Group.